

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ALOKASI APBD TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Mahindah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Arga Christian Sitohang

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat:

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No.45 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, 60118

Korespondensi penulis : mahindah@untag-sby.ac.id

Abstrak. Kemiskinan masih menjadi isu krusial dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo, meskipun wilayah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat sasaran diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam menekan angka kemiskinan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas dan efisiensi alokasi APBD, baik secara parsial maupun simultan, terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo periode 2011–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder time series selama 14 tahun. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Variabel independen terdiri dari rasio efektivitas (realisasi vs target pendapatan) dan rasio efisiensi (realisasi vs anggaran belanja), sedangkan variabel dependen adalah tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas alokasi APBD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan efisiensi alokasi APBD tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Pengelolaan anggaran daerah memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan, namun aspek efisiensi belanja perlu dievaluasi agar lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Anggaran, Efisiensi Anggaran, APBD, Kemiskinan, Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Di Kabupaten Sidoarjo, dinamika kemiskinan menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada periode tertentu, tingkat kemiskinan per kapita dan biaya hidup terus meningkat. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan mencapai Rp597.284 per kapita dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,53%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menanggulangi kemiskinan melalui instrumen kebijakan fiskal, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola keuangannya, khususnya dalam aspek efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian target pendapatan untuk membiayai pembangunan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan optimalisasi belanja daerah untuk menghasilkan *output* maksimal (Mahmudi, 2019).

Namun, fenomena di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara realisasi anggaran dan dampak sosial yang dihasilkan. Meskipun realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sidoarjo sering kali melampaui target atau berada pada kategori efektif, penurunan angka kemiskinan belum berjalan linier dengan peningkatan anggaran tersebut. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Fitriani & Alisman (2023) menemukan bahwa peningkatan APBD justru diikuti kenaikan kemiskinan jika tidak tepat sasaran, sementara Setyo & Anggraini (2024) menyoroti inefisiensi belanja pada sektor strategis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh efektivitas dan efisiensi alokasi APBD terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo periode 2011–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi evaluasi kebijakan fiskal daerah agar lebih responsif terhadap isu kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode asosiatif kausal untuk mengetahui hubungan antar variabel. Data yang digunakan adalah data runtun waktu (time series) selama 14 tahun, mulai dari tahun 2011 hingga 2024.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Sidoarjo (2011–2024) yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Data Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo (2011–2024) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Definisi Operasional Variabel

1. Efektivitas Alokasi APBD (X1): Diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan daerah.

Rumus: $(\text{Realisasi Pendapatan} / \text{Target Pendapatan}) \times 100\%$

2. Efisiensi Alokasi APBD (X2): Diukur dengan membandingkan realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah.

Rumus: $(\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja}) \times 100\%$

3. Kemiskinan (Y): Diukur berdasarkan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan Regresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan data yang dikumpulkan, tingkat efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo tergolong baik, dengan capaian rata-rata di atas 100% pada sebagian besar tahun pengamatan. Puncak efektivitas terjadi pada tahun 2014 (125,01%). Sementara itu, efisiensi belanja daerah menunjukkan fluktuasi, dengan tren penurunan efektivitas serapan anggaran pasca tahun 2015, dan kembali membaik pada periode 2021–2024 (kisaran 92-93%).

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

- **Konstanta (0,839):** Jika efektivitas dan efisiensi bernilai konstan, tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 0,839 satuan.
- **Koefisien Efektivitas (7,027):** Menunjukkan arah positif.
- **Koefisien Efisiensi (-2,656):** Menunjukkan arah negatif, yang berarti peningkatan efisiensi berpotensi menurunkan kemiskinan.

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F) :

Nilai F-hitung sebesar 5,140 dengan signifikansi 0,027 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Efektivitas dan Efisiensi Alokasi APBD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

2. Uji Parsial (Uji t):

- **Efektivitas (X1):** Nilai signifikansi 0,015 ($< 0,05$). Hipotesis diterima, efektivitas berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Arah koefisien positif mengindikasikan bahwa tingginya realisasi pendapatan (efektivitas) tidak serta merta menurunkan kemiskinan, bahkan dalam model ini berkorelasi positif. Hal ini bisa terjadi jika pendapatan yang tinggi memicu kenaikan biaya hidup atau alokasi yang tidak pro-rakyat miskin.
- **Efisiensi (X2):** Nilai signifikansi 0,190 ($> 0,05$). Hipotesis ditolak, efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun arahnya negatif (mengurangi kemiskinan), secara statistik pengaruhnya belum kuat.

3. Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,389 (38,9%). Artinya, variabel efektivitas dan efisiensi mampu menjelaskan 38,9% variasi tingkat kemiskinan, sedangkan sisanya 61,1% dipengaruhi faktor lain di luar model.

Pembahasan

1. Pengaruh Efektivitas Alokasi APBD terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa efektivitas alokasi APBD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,015. Namun, temuan menarik dari penelitian ini adalah koefisien regresi yang bernilai positif (+7,027). Secara statistik, hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan rasio efektivitas (realisasi pendapatan yang melampaui target) justru berkorelasi dengan peningkatan atau tidak menurunnya angka kemiskinan secara signifikan pada periode yang sama.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriani & Alisman (2023) yang menemukan bahwa peningkatan anggaran tidak selalu diikuti dengan penurunan kemiskinan jika alokasi tidak tepat sasaran. Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, anomali ini dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif:

Sumber Pendapatan yang Membebani: Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai target efektivitas yang tinggi mungkin bersumber dari intensifikasi pajak dan retribusi. Jika beban ini jatuh kepada pelaku usaha mikro atau masyarakat rentan tanpa adanya timbal balik layanan yang memadai, maka daya beli masyarakat dapat tergerus, yang pada akhirnya berdampak pada garis kemiskinan.

Kesenjangan Alokasi (Misallocation): Tingginya realisasi pendapatan daerah belum tentu dikonversi menjadi belanja program yang pro-rakyat miskin (pro-poor budgeting). Jika surplus pendapatan lebih banyak dialokasikan untuk belanja birokrasi, pembangunan gedung pemerintahan, atau sektor yang padat modal (bukan padat karya), maka dampak terhadap pengentasan kemiskinan menjadi minim.

Lag Time (Jeda Waktu): Efektivitas pendapatan tahun berjalan mungkin baru memberikan dampak ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Pendapatan yang diterima hari ini tidak serta merta mengubah status ekonomi penduduk miskin secara instan.

2. Pengaruh Efisiensi Alokasi APBD terhadap Kemiskinan

Hasil uji t untuk variabel efisiensi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,190 ($> 0,05$), yang berarti efisiensi alokasi APBD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah negatif (-2,656)—yang berarti semakin efisien anggaran, kemiskinan cenderung turun—namun secara statistik pengaruh ini tidak kuat.

Ketidaksignifikanan ini memberikan indikasi bahwa:

Efisiensi Semu: Efisiensi yang diukur dari rasio realisasi belanja terhadap anggaran sering kali hanya mencerminkan penghematan anggaran atau ketidakmampuan menyerap anggaran (SILPA tinggi). Penghematan anggaran dalam konteks pengentasan kemiskinan bisa jadi kontraproduktif. Dana yang seharusnya dibelanjakan untuk bantuan sosial atau pemberdayaan masyarakat yang "dihemat" atau tidak terserap justru menyebabkan target penurunan kemiskinan tidak tercapai.

Kualitas Belanja: Tidak signifikkannya efisiensi juga menyoroti masalah kualitas belanja (spending quality). Belanja daerah di Kabupaten Sidoarjo mungkin masih didominasi oleh Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) yang bersifat tetap dan kaku. Akibatnya, ruang fiskal untuk Belanja Modal (infrastruktur publik) dan Belanja Barang Jasa (layanan publik) yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap ekonomi masyarakat menjadi terbatas.

Temuan ini mendukung penelitian Kende et al. (2024) yang menyatakan bahwa belanja daerah di banyak wilayah belum efisien dalam menyasar pembangunan manusia, sehingga dampaknya terhadap kemiskinan belum merata.

3. Pengaruh Simultan Efektivitas dan Efisiensi terhadap Kemiskinan

Secara simultan, hasil uji F menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi 0,027. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,389 menunjukkan bahwa 38,9% perubahan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan oleh dinamika pengelolaan anggaran (efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja).

Hal ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal daerah merupakan satu kesatuan sistem. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak bisa hanya berfokus pada sisi pendapatan (mengejar target pajak/retribusi) tanpa memperbaiki sisi belanja (ketepatan sasaran program). Penurunan kemiskinan yang berkelanjutan membutuhkan sinergi antara kemampuan daerah menghimpun dana (efektivitas) dan kepiawaian daerah dalam membelanjakannya untuk program prioritas (efisiensi alokatif, bukan sekadar efisiensi teknis/penghematan). Faktor lain di luar model (61,1%) seperti kondisi makroekonomi, inflasi, dan investasi swasta juga turut berkontribusi, namun peran APBD tetap sentral sebagai stimulus pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Alokasi APBD berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
2. Efisiensi Alokasi APBD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara parsial.
3. Secara simultan, Efektivitas dan Efisiensi Alokasi APBD berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

Implikasi dan Saran

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo disarankan untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian target nominal pendapatan (efektivitas administratif), tetapi lebih pada kualitas belanja (spending quality). Optimalisasi efisiensi harus diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi yang nyata, bukan sekadar penyerapan anggaran. Diperlukan pengawasan ketat agar alokasi APBD benar-benar menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah guna menurunkan angka kemiskinan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). *Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2024*. Badan Pusat Statistik.

Fitriani, L., & Alisman, A. (2023). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 3(2), 146.

Kementerian Keuangan. (2025). *Data APBD Kabupaten Sidoarjo 2011-2024*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kende, T. A., Hafizrianda, Y., & Ngutra, R. N. (2024). Efektivitas Dan Efisiensi Belanja Daerah Untuk Pembangunan Manusia Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Papua. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 9(2), 221–246.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YPKN.

Setyaningrum, I., Qudus, N., & Nirwana, S. (2023). Analisis Realisasi Anggaran dalam Menilai Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomis Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019–2022.

Setyo, S., & Anggraini Rambe, R. (2024). Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Saat Pandemi Covid-19 Di Provinsi Aceh. *Media Ekonomi*, 31(2), 207–218.

Sudiana, D., et al. (2024). Effectiveness and Efficiency of Regional Revenue And Expenditure Management In Kuningan Regency. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 5